



POLICY BRIEF

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian

POTENSI DAMPAK PENCABUTAN LARANGAN EKSPOR BERAS INDIA TERHADAP HARGA BERAS DOMESTIK¹

PENDAHULUAN

1. Sebagai eksportir beras terbesar di dunia, kebijakan pelarangan ekspor beras India yang diberlakukan sejak pertengahan tahun 2023 dan diperparah oleh El Nino, telah memicu peningkatan harga beras di pasar dunia. Harga beras Thailand *Broken* 5 persen sempat menyentuh US\$660 per ton pada bulan Januari 2024; namun sesudahnya kembali melandai walaupun dalam kisaran US\$590-600 per ton. Kondisi yang sedikit berbeda terjadi pada beras Vietnam *Broken* 5 persen, yang setelah mencapai harga tertinggi pada Januari 2024 (US\$625,51 per ton), secara konsisten terus menurun dan pada Agustus 2024 harganya sebesar US\$535,25 per ton. Penurunan harga beras dunia, selain dipicu oleh semakin pulihnya produksi beras di banyak negara produsen (setelah sempat anjlok pada tahun 2023 akibat El Nino); patut diduga juga berkaitan dengan kebijakan perberasan India yang sejak pertengahan tahun 2024 sudah memberikan sinyal untuk mencabut larangan ekspor berasnya. Kebijakan ekspor beras India sangat mempengaruhi pasar beras global karena pangsa ekspor beras India mencapai 40 persen dari total perdagangan beras global yang pada tahun 2022 sebesar 55 juta ton.
2. Dalam beberapa minggu terakhir, Pemerintah India sudah mulai merelaksasi pengetatan ekspor beras melalui kebijakan penurunan harga minimum ekspor beras Basmati (Minimum Export Price) dari US\$1.200 per ton menjadi US\$850 per ton; dan melakukan pencabutan larangan ekspor beras putih nonBasmati dan digantikan dengan penetapan MEP sebesar US\$490 per ton secara efektif mulai tanggal 27 September 2024. Selain itu, pajak penjualan ekspor beras pratanak (*parboiled*) dan ekspor gabah juga diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen. Kebijakan relaksasi ekspor beras India diprediksi akan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai negara eksportir beras terbesar, larangan ekspor beras India yang diberlakukan sejak pertengahan tahun 2023 telah memicu peningkatan harga beras di pasar dunia. Harga beras Thailand *Broken* 5 persen mencapai US\$660 per ton pada Januari 2024. Dalam beberapa minggu terakhir, Pemerintah India mulai merelaksasi larangan ekspor beras melalui:

1. Penurunan harga minimum ekspor beras Basmati dari US\$1.200 per ton menjadi US\$850 per ton;
2. Pencabutan larangan ekspor beras putih nonBasmati; digantikan dengan penetapan MEP sebesar US\$490 per ton (efektif 27 September 2024).
3. Pajak penjualan ekspor beras pratanak (*parboiled*) dan ekspor gabah diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen

Kebijakan relaksasi ekspor beras India diprediksi akan segera mengoreksi harga beras dunia ke dalam kisaran US\$450-500 per ton. Namun trend harga beras domestik justru meningkat. Sejak Januari 2023 hingga September 2024 harga beras di tingkat grosir mengalami kenaikan dari Rp11.648 per kg menjadi Rp13.611/kg setelah mencapai puncak pada Maret 2024 (Rp14.528 per kg). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras yang berkepanjangan telah mengkondisikan tingkat keseimbangan harga beras yang baru, meskipun terdapat impor beras yang relatif besar, maka akan berpotensi memperoleh harga beras impor yang kompetitif untuk menstabilkan harga beras domestik.

Saran kebijakan yang perlu ditempuh adalah:

1. Peningkatan kapasitas produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.
2. Kebijakan secara penuh dan konsisten, mulai dari hulu hingga hilir; serta implementasi alat dan mesin pertanian modern.
3. Secara serius mendorong diversifikasi konsumsi untuk mengurangi kebutuhan konsumsi beras.
4. Peningkatan sinergi dan integrasi proram dengan menunjuk satu K/L sebagai "komando" untuk menjadi "dirijen" program peningkatan produksi pangan strategis

¹ Bahan Dipersiapkan oleh: Sudi Mardianto, Sumedi, dan Adi Setiyanto

segera mengoreksi harga beras dunia ke dalam kisaran US\$450-500 per ton.

3. Tren harga beras dunia yang mulai turun, ternyata tidak sejalan dengan perkembangan harga beras domestik. Harga beras domestik di penggilingan, grosir dan eceran selama tiga bulan terakhir relatif stabil masing-masing dalam kisaran Rp12.800; Rp13.600; dan Rp14.500 per kg. Bahkan harga gabah kering giling di tingkat petani pada bulan Agustus 2024 mencapai Rp7.177 per kg; hampir menyamai harga minimum ekspor beras nonBasmati India yang ditetapkan US\$490 per ton atau setara Rp7.350 per kg (kurs Rp15.000 per US\$). Fakta ini memberikan dua informasi penting yang perlu dicermati, yaitu: (a) potensi penurunan harga beras di pasar dunia, yang bisa jadi akan menguntungkan Indonesia apabila masih harus impor untuk penguatan cadangan beras nasional; dan (b) perlunya peningkatan efisiensi usaha budi daya padi, apabila Indonesia berkeinginan suatu saat untuk mengekspor beras. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian singkat potensi dampak kebijakan pencabutan larangan ekspor beras India terhadap pasar beras dunia dan domestik.

Dinamika Kebijakan Perberasan India

4. Guna mengendalikan harga beras di pasar domestik yang mengalami gangguan, utamanya akibat fenomena perubahan iklim, pemerintah India sejak Mei 2023 telah mengeluarkan kebijakan perberasan, utamanya yang berkaitan dengan ekspor beras. Berikut uraian ringkas dinamika kebijakan perberasan India yang dalam perkembangannya telah berdampak terhadap harga beras di pasar global:
 - a. 24 Mei 2023, pemerintah India mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor beras patahan, kecuali atas dasar izin yang diberikan oleh Pemerintah India ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan mereka dan berdasarkan permintaan pemerintah mereka.
 - b. 20 Juli 2023, pemerintah India melarang ekspor beras putih nonBasmati, kecuali: (i) beras nonBasmati sudah dimuat ke kapal sebelum notifikasi pelarangan ekspor diterbitkan (sebelum 20 Juli 2023); (ii) dokumen pengiriman barang (via laut) telah diterima dan penyewaan kapal pengangkut telah dilakukan oleh otoritas berwenang; (iii) beras nonBasmati yang akan diekspor telah diserahkan ke pihak bea dan cukai di pelabuhan untuk diperiksa; dan (iv) ekspor beras nonBasmati diijinkan jika ada ijin yang diterbitkan oleh pemerintah India dan ditujukan ke negara-negara yang terancam ketahanan pangannya.
 - c. 28 Juli 2023, pemerintah India membatasi ekspor dedak padi yang telah dihilangkan minyaknya, yang digunakan dalam industri pakan ternak hingga 30 November 2023.
 - d. 25 Agustus 2023, pemerintah India mengenakan bea masuk sebesar 20% terhadap ekspor beras pratanak (*parboiled*). Ekspor beras pratanak mempunyai pangsa ekspor 30 persen dari total ekspor beras India.
 - e. 27 Agustus 2023, pemerintah India memberlakukan harga ekspor minimum (MEP) beras Basmati sebesar US\$1.200 per ton. Namun pada akhir Oktober 2023, MEP beras Basmati diturunkan menjadi US\$950 per ton.
 - f. 28 September 2024, pemerintah India mencabut larangan ekspor beras putih nonBasmati, namun menetapkan harga minimum ekspor beras tersebut sebesar US\$490 per ton. Selain itu, pemerintah India juga menurunkan bea ekspor beras pratanak dari 20 persen menjadi 10 persen.
 - g. Salah satu pertimbangan pencabutan larangan ekspor beras putih nonBasmati adalah meningkatnya stok beras di gudang pemerintah yang per tanggal 1 September 2024 mencapai 32,3 juta metrik ton (38,6% lebih tinggi dibanding 2023). Selain itu, luas

pertanaman padi 2024 diperkirakan mencapai 41,35 juta hektar, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 40,45 juta hektar.

5. Dukungan kebijakan usaha tani padi di **India** antara lain: (i) subsidi input produksi, seperti benih, pupuk, alat dan mesin, listrik untuk pertanian dan irigasi; (ii) **dukungan harga output (gabah) dalam bentuk *Minimum Support Price (MSP)* yang pada tahun 2023/2024 ditetapkan sebesar Rs2.183 per kuintal atau sekitar Rp4.082 per kg (kurs Rp.187 per 1 Ruppee India);** (iii) subsidi bunga pinjaman untuk biaya usaha tani padi; dan (iv) pengadaan beras pemerintah untuk bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Pengadaan beras pemerintah India (*rice procurement*) oleh *Food Corporation of India (FCI)* pada musim tanam 2023-2024 mencapai 45,44 juta ton (turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 49,01 juta ton). Selain itu, pemerintah India juga menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis. Sebagai contoh, untuk mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina, pemerintah India pada akhir tahun 2022 menerapkan kebijakan pembatasan ekspor beras dan penetapan harga minimum ekspor beras Basmati. Selain itu, untuk mengatasi kenaikan harga pupuk, pemerintah India memberikan subsidi transportasi kepada pabrik pupuk India. Dukungan kebijakan terbaru, sejak Mei 2022 Pemerintah India memberikan bantuan kepada petani untuk membeli “drone” yang digunakan untuk memantau kondisi pertanaman, pemupukan dan penyemprotan pestisida, serta digitalisasi lahan.

Dampak Pencabutan Larangan Ekspor Beras India

6. Harga beras India selama ini dikenal paling rendah di pasar dunia (Tabel 1); sehingga kebijakan pencabutan pelarangan ekspor beras nonBasmati disambut sangat antusias oleh negara yang selama ini ketersediaan berasnya didukung oleh ekspor beras India. Namun di sisi lain, kebijakan beras India tersebut “mengakhiri” periode beras “mahal” yang selama ini dinikmati negara pengekspor beras, seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Berikut diuraikan secara ringkas, beberapa dampak “segera” setelah pemerintah India mencabut larangan ekspor beras nonBasmati:
 - a. Kebijakan pelarangan ekspor beras putih nonBasmati pada akhir Juli 2023 langsung berdampak terhadap kenaikan harga beras di pasar global. Berdasarkan data World Bank, harga beras di pasar global untuk beras Thailand *broken 5* persen pada Agustus 2023 (satu bulan pasca kebijakan larangan ekspor beras India) mencapai US\$635 per ton (naik tajam dibanding Juli 2023 yang sebesar US\$547 per ton); sementara beras Vietnam untuk kualitas yang sama, naik dari US\$503 per ton menjadi US\$541 per ton. Kebijakan beras India yang diperparah dengan El Nino, menjadikan harga beras di pasar global melambung dan mencapai puncaknya pada Januari 2024, dimana harga beras Thailand dan Vietnam untuk *broken 5* persen masing-masing mencapai US\$660 dan US\$625 per ton.
 - b. Pasar beras global segera terkoreksi setelah pemerintah India mengumumkan pencabutan larang ekspor beras putih nonBasmati. Harga beras Thailand *broken 5* persen yang pada tanggal 25 September 2024 masih sekitar US\$570 per ton; langsung anjlok menjadi US\$509 per ton pada 2 Oktober 2024. Beras Vietnam untuk kualitas yang sama juga turun dari US\$565 per ton menjadi US\$552 per ton dalam satu minggu terakhir. Harga beras di pasar global diprediksi akan semakin turun setelah India menawarkan harga beras nonBasmati *broken 5* persen dalam kisaran US\$490-US\$495 per ton.
 - c. Pakistan merespon kebijakan India dengan menghapus MEP beras Basmati yang sebelumnya ditetapkan sebesar US\$1.300. Pakistan merupakan salah satu negara eksportir beras yang mendapat keuntungan besar dari kebijakan pelarangan ekspor beras India. Dari Juli 2023 hingga Juni 2024, volume ekspor beras Pakistan meningkat lebih dari

60 persen sementara nilai ekspornya naik hingga 78 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

- d. Kebijakan beras India direspon sangat positif oleh Afrika Selatan dan Uni Emirat Arab. Kedua negara tersebut merupakan pengimpor beras India untuk memenuhi kebutuhan domestik dan dijual kembali (baca: re-ekspor), utamanya ke negara di kawasan Afrika. Afrika Selatan selama ini mengimpor beras sekitar 10 juta ton setiap tahunnya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan dijual (re-ekspor) ke negara tetangga.
7. Bagi petani India, keputusan pemerintah mengizinkan kembali ekspor beras non-basmati berdampak positif terhadap pendapatan melalui harga gabah yang semakin kompetitif. Walaupun masih ada pajak ekspor 10 persen untuk beras pratanak dan harga dasar ekspor beras nonBasmati sebesar US\$490 per ton; pelaku usaha perberasan India optimis harga beras India masih dapat bersaing di pasar global.
8. Struktur ongkos usaha tani padi India sebenarnya relatif bersaing dengan negara produsen utama beras di kawasan Asia (Tabel 2). Untuk menghasilkan satu kilogram gabah (GKG) di India, diperlukan biaya sekitar Rp3.336; masih lebih mahal dibandingkan dengan di Vietnam, Thailand, dan Pakistan yang berkisar Rp2.213-Rp2.983 per kg. Namun biaya di India tersebut, masih lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia, Tiongkok, dan Bangladesh yang sudah di atas Rp4.000 per kg. Biaya total usaha tani padi India sebenarnya relatif sama dengan Vietnam, Thailand, dan Pakistan (sekitar Rp15 jutaan per hektar); namun produktivitas padi India (4,76 ton/ha) lebih rendah dibandingkan dengan ketiga negara produsen tersebut (sudah di atas 5 ton/hektar dan Vietnam bahkan sudah mencapai lebih dari 6 ton/ha). Perbedaan faktor produktivitas itulah yang menyebabkan biaya per kilogram gabah India lebih mahal dibandingkan dengan tiga negara pesaing utama pengekspor beras.

Potensi Dampak terhadap Pasar Beras Indonesia

9. Berdasarkan data BPS, impor beras Indonesia tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 614 persen dibanding impor tahun 2022 yang hanya 429.210 ton. Lonjakan impor 2023 utamanya disebabkan oleh penurunan produksi padi yang terdampak El Nino, sehingga harga gabah dan beras domestik sejak bulan Agustus 2023 hingga Pebruari 2024 mengalami kenaikan yang relatif tinggi. Impor beras Indonesia pada tahun 2023 secara tidak langsung terimbas oleh kebijakan pelarangan ekspor beras putih nonBasmati India, yang menyebabkan harga beras di pasar global meningkat tajam. Harga beras global (*broken 5%*) yang selama kurun waktu Agustus 2023-September 2024 bertahan dalam kisaran US\$540-US\$600an per ton; segera terkoreksi (baca: harga turun) setelah pemerintah India mengumumkan pencabutan larangan ekspor beras putih nonBasmati. Pertanyaannya adalah apakah fenomena penurunan harga beras global akibat kebijakan India tersebut berdampak positif terhadap pasar beras Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut beberapa informasi penting terkait perberasan Indonesia:
 - a. Berdasarkan data BPS, sejak Januari 2023 hingga September 2024 harga beras di tingkat grosir secara konsisten terus mengalami kenaikan. Harga beras di grosir pada Januari 2023 sekitar Rp11.648 per kg; kemudian mencapai puncak tertinggi pada Maret 2024 (Rp14.528 per kg) dan sesudahnya sedikit melandai (harga September 2024 sebesar Rp13.611 per kg) (Tabel 3). Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan harga gabah dan beras yang berkepanjangan telah mengkondisikan tingkat keseimbangan harga beras yang baru. Impor beras yang relatif besar dapat dikatakan hanya mampu mengendalikan kenaikan harga beras tidak berkelanjutan.

- b. Selama Januari-September 2024, ada ketidakselarasan perkembangan harga beras di pasar global dengan di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata pertumbuhan harga beras *broken* 5 persen Thailand dan Vietnam masing-masing -1,53 persen per tahun dan -1,80 persen per tahun; sementara harga beras Indonesia justru tumbuh positif 0,06 persen per tahun.
- c. Untuk penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), pemerintah telah memberikan penugasan ke Perum Bulog untuk melakukan impor beras pada tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Realisasi impor beras Januari-Mei 2024 sudah mencapai 2,755 juta ton dan rencana impor Juni-Desember 2024 sekitar 1,596 juta ton (termasuk impor beras industri dan beras khusus). Impor beras yang belum terealisasi akan dilakukan apabila produksi beras di dalam negeri tidak mencukupi. Apabila produksi beras dalam negeri sampai akhir tahun 2024 mengalami defisit, maka sisa rencana impor akan direalisasikan. Mencermati tren harga beras global yang diprediksi akan menurun hingga di bawah US\$500 per ton serta dipadu dengan penguatan kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat; maka Indonesia berpotensi memperoleh harga beras impor yang sangat kompetitif untuk menstabilkan harga beras domestik.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kesimpulan

- 10. Sebagai salah satu produsen dan eksportir utama beras, kebijakan perberasan India akan mempengaruhi dinamika harga beras di pasar global. Kebijakan pelarangan ekspor beras putih nonBasmati pada akhir Juli 2023 langsung berimbas terhadap kenaikan harga beras; dan pencabutan kebijakan tersebut pada akhir September 2024 juga langsung direspon pelaku pasar dengan menurunkan harga beras. Fakta ini memberikan beberapa pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Fenomena perubahan iklim dan konflik geopolitik yang semakin rentan terjadi di berbagai wilayah dunia; mengkondisikan perlunya setiap negara yang mempunyai potensi sumber daya pertanian, untuk meningkatkan produksi domestik agar lebih tahan terhadap goncangan ketersediaan bahan pangan di pasar global. Kebijakan pembatasan ekspor pangan (*safety first*) merupakan keniscayaan untuk berulang dalam siklus yang semakin pendek, sehingga peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan harus menjadi strategi utama.
 - b. India merupakan salah satu produsen beras dengan tingkat harga yang paling kompetitif. Untuk itu, apabila Indonesia berencana mencapai swasembada dan menjadi salah satu eksportir beras; maka efisiensi produksi harus menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi.
 - c. Dikarenakan beras sebagai salah satu bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk India, pemerintah India memberikan perhatian secara penuh terhadap agribisnis perberasannya, melalui dukungan kebijakan hulu-hilir secara lengkap dan mengikuti perkembangan teknologi. Pembelajaran utamanya adalah walaupun (dipahami) dukungan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi di negara yang bersangkutan; namun pemerintah perlu berkomitmen secara konsisten dalam menetapkan dukungan kebijakan terhadap komoditas pangan strategis.

Rekomendasi Kebijakan

- 11. Belajar dari pengaruh perubahan iklim yang siklusnya semakin pendek dan dinamis, serta kebijakan pangan dari negara lain (baca: kebijakan beras India), maka diusulkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas produksi dan mempertahankannya pada tingkat yang dapat memenuhi (utamanya) kebutuhan pangan domestik. Sumber peningkatan kapasitas produksi yang utama adalah perluasan lahan pertanian (ekstensifikasi) dan optimalisasi lahan pertanian (peningkatan indeks pertanaman, produktivitas, dan efisiensi usaha pertanian).
- b. Penetapan dukungan kebijakan secara penuh dan konsisten, mulai dari hulu hingga hilir; serta implementasi alat dan mesin pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Terkait alsintan, bantuan gratis pemerintah harus mulai dikurangi dan digantikan dengan dukungan pembiayaan untuk pembelian secara individu maupun kelompok tani.
- c. Terkait dengan tantangan peningkatan produksi padi secara berkelanjutan yang tidak ringan, pemerintah perlu meningkatkan keseriusan untuk mengurangi konsumsi beras per kapita, melalui diversifikasi sumber karbohidrat selain beras.
- d. Saat ini berbagai tantangan usaha tani padi dan usaha pertanian lainnya, sebagian besar berkaitan dengan kementerian/lembaga di luar Kementan. Contoh, tata kelola air utamanya dikelola oleh Kementerian PUPR; pengendalian alih fungsi lahan dalam kendali pemerintah daerah dan kementerian ATR/BPN; penyediaan pupuk dalam kendali Kementerian BUMN; pengaturan harga dan cadangan beras pemerintah oleh Badan Pangan Nasional; dan kepatuhan pelaksanaan kegiatan di daerah perlu dukungan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, belajar dari keberhasilan pengalaman era Program Bimbingan Massal (Bimas) dan pengendalian inflasi; diperlukan lembaga “komando” (dapat ditunjuk dari K/L yang sudah ada) yang merupakan perpanjangan tangan langsung Presiden untuk menjadi “dirijen” program peningkatan produksi pangan strategis.

Tabel 1. Perkembangan Harga Beras Kualitas *Broken* 5% di Negara Produsen Beras, Juli 2022-Juli 2023

Negara	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23
Argentina	518,0	514,8	530,0	547,5	557,5	578,0	582,5	591,8	591,0	602,5	611,3	576,6	602,3
Brazil	534,2	549,8	550,0	560,0	577,5	622,8	624,5	632,0	625,6	637,3	636,5	628,2	639,5
India	346,8	342,3	376,4	376,8	384,8	391,0	418,8	428,5	418,2	428,5	434,0	463,2	489,0
Pakistan	380,0	371,5	396,6	388,8	412,3	449,6	465,5	476,3	457,4	496,8	533,8	489,2	517,0
USA	662,4	671,5	675,8	687,0	697,8	702,0	718,8	728,3	727,0	718,8	714,8	716,2	711,5
Vietnam	395,6	384,8	395,4	421,0	426,3	441,0	449,3	450,3	439,0	456,5	485,3	487,0	504,0
Thailand	418,0	431,0	439,0	431,0	440,0	467,0	517,0	492,0	476,0	501,0	510,0	514,0	547,0

Sumber: FAO

Tabel 1. Hasil Analisis Usahatani Padi Indonesia dan Beberapa Negara Asia per Hektar per musim, 2021-2022 (Rp000)

No	Keterangan	Indonesia ¹	India ²	Tiongkok ³	Vietnam ⁴	Thailand ⁵	Philippines ⁶	Pakistan ⁷	Bangladesh ⁸
A.	Biaya Variabel								
1	Benih	1.086,68	618,82	1.749,08	1.050,21	1.976,58	964,85	737,44	415,52
2	Pupuk	2.144,06	1.340,18	4.350,63	3.115,14	2.759,94	3.229,28	2.395,16	2.410,85
3	Pestisida	1.595,68	453,87	3.029,86	2.010,13	1.590,55	723,88	244,01	540,18
4	Tenaga Kerja Manusia	7.085,23	5.377,26	6.891,31	2.944,16	2.297,72	5.911,62	3.121,10	10.969,75
5	Sewa Alsintan	2.128,91	2.251,51	7.216,81	1.892,52	2.938,22	2.057,30	3.602,93	1.371,22
6	Biaya Variabel Lainnya	504,56	1.146,04	183,29	334,02	593,21	727,61	238,19	706,39
	Sub Total	12.418,33	11.187,67	23.420,98	11.346,17	12.156,22	13.614,53	10.338,82	16.413,90
B.	Biaya Tetap								
1	Sewa Lahan	6.763,91	4.025,53	8.677,23	3.433,28	3.343,06	1.214,37	3.578,75	2.908,65
2	Pajak, luran dan Lainnya		110,65			4,51	371,81	14,31	
3	Biaya Tetap Lainnya		581,21	58,23	411,71	117,33	581,82	614,89	295,61
	Sub Total		4.717,39	8.735,46	3.844,99	3.464,90	2.168,00	4.207,95	3.204,25
	Total Biaya	27.172,26	15.905,07	32.156,44	15.191,16	15.621,12	15.782,52	14.546,78	19.618,16
C.	Penerimaan								
1	Produksi (Kg)	5.159,80	4.768,13	6.780,29	6.863,33	5.236,82	4.760,01	5.189,21	4.720,79
2	Harga (Rp/Kg)	5.266,00	5.076,36	6.867,84	3.290,84	4.721,64	5.866,28	4.219,72	5.130,14
	Total Penerimaan	27.172,26	24.204,72	46.565,95	22.586,13	24.726,38	27.923,52	21.897,04	24.218,31
D.	Pendapatan	5.893,24	8.299,66	14.409,50	7.394,97	9.105,26	12.141,00	7.350,26	4.600,16
E.	R/C Ratio	1,28	1,52	1,45	1,49	1,58	1,77	1,51	1,23
F.	Biaya Per Kg (Rp/Kg)	4.124,00	3.335,70	4.742,64	2.213,38	2.982,94	3.315,65	2.803,27	4.155,69

Keterangan: Sumber Data (diolah) 1= Data Patanas PSEKP (2022-2023), memperhitungkan tenaga kerja dalam keluarga dan nilai sewa lahan; 2= Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Economics & Statistics Division (2023); 3 = China Agricultural Statistics (2023) dan Philippine Rice Research Institute (Philrice, 2023); 4=Vietnam General Statistics Office (2023), Philrice (2023) dan Philippines Rice Industry Roadmap 2030 (2022); 5 = Thailand Department of Socio Economics Statistics (2023), Philrice (2023) dan Philippines Rice Industry Roadmap 2030 (2022); 6= 2022 Survey on Costs and Returns of Palay Production Philippine Statistics Authority (2023), 7 = Pakistan Rice Paddy Policy Analysis For 2022-23 Crop, API Series No 248 (2023), 8 = Bangladesh Bureau of Statistics (2023) dan Bangladesh Rice Research Institute (2023); 9= Statistical Survey on Farm Management Production Cost of Crops (Individual Management Entities) by the Statistics Department of MAFF (2023). Nilai Tukar 2021-2022: US\$ 1 = 6.45 Chinese Yuan, 49.29 Philippino Peso; 73.94 Indian Rupees; 30.05 Thailand Bath; 109.87 Japanese Yen; 163.01 Pakistani Rupees; 85.09 Bangladesian Taka; 22,938.00 Vietnamese Dong; dan 14,308.00 Indonesian Rupiah.

Tabel 3. Perkembangan Harga Beras *Broken* 5% Thailand dan Vietnam (US\$/ton) dan Grosir Indonesia (Rp/kg), Januari 2023-September 2024

Tahun/Bulan	Thailand	Vietnam	Grosir
2023M01	517,00	440,66	11.648
2023M02	492,00	448,28	11.990
2023M03	476,00	444,64	12.042
2023M04	501,00	455,10	12.092
2023M05	510,00	470,53	12.103
2023M06	514,00	508,24	12.116
2023M07	547,00	502,76	12.142
2023M08	635,00	541,15	12.266
2023M09	620,00	594,37	13.037
2023M10	590,00	616,15	13.315
2023M11	598,00	629,41	13.380
2023M12	644,00	632,90	13.458
2024M01	660,00	625,51	13.588
2024M02	624,00	614,26	14.397
2024M03	613,00	585,43	14.528
2024M04	592,00	571,50	13.902
2024M05	628,00	567,97	13.471
2024M06	632,00	561,63	13.433
2024M07	590,00	552,43	13.571
2024M08	589,00	535,25	13.600
2024M09	580,00	540,46	13.611

Sumber: World Bank dan BPS